

## PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG RAIH PENGHARGAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)*



**Sumber Gambar:**

<https://i0.wp.com/pertamanews.id/wp-content/uploads/2023/10/WhatsApp-Image-2023-10-08-at-20.16.33.jpeg?w=1600&ssl=1>

### **Isi Berita:**

UNGERAN (Pertamanews.id) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi warganya, membuahkan penghargaan universal health coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan Pusat.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan, pada 2023, telah dianggarkan dana sebesar Rp49 miliar lebih di APBD, untuk iuran kepesertaan jaminan kesehatan bagi mereka. Dana itu mendukung pencapaian jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan untuk 1.024.984 orang atau 96,12 persen dari total penduduk.

“Pelayanan kesehatan sangat penting dan menjadi salah satu prioritas. Pencapaian UHC ini akan semakin memudahkan warga mengakses jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan,” tegas bupati, saat menerima piagam penghargaan dari BPJS Kesehatan, di Alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran Timur, beberapa hari lalu.

Ditambahkan oleh bupati, sejak 2021, anggaran untuk iuran jaminan kesehatan terus meningkat. Kenaikannya mencapai Rp20 miliar lebih.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr Lily Kresnowati mengatakan, saat ini, sudah ada 371 dari 514 kabupaten/kota yang mencapai tahap UHC di tanah air. Tahap itu ditandai kepesertaan jaminan kesehatan lebih dari 95 persen dari total penduduk.

“UHC memastikan setiap orang memiliki akses pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Dwi Syaiful Noor Hidayat menjelaskan, jumlah warga penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari APBN sebanyak 364.359

jiwa (34,17 persen), PBI APBD sebanyak 149.253 jiwa (13,99 persen), pekerja penerima upah sebanyak 384.256 jiwa (36,03 persen), pekerja bukan penerima upah/informal sebanyak 104.387 jiwa (9,79 persen), dan bukan pekerja sebanyak 22.729 jiwa (2,13 persen) dari total jumlah penduduk.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pertamanews.id/2023/10/09/pemkab-semarang-raih-penghargaan-uhc/>, “Pemkab Semarang Raih Penghargaan UHC”, tanggal 9 Oktober 2023.
2. <https://main.semarangkab.go.id/pemkab-semarang-raih-penghargaan-uhc/>, “Pemkab Semarang Raih Penghargaan UHC”, tanggal 6 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*